

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM
PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN 2012-2014**

Oleh :

Dwi Susanti

Email :Dwi_susanty52@yahoo.com

Supervisor : Dra. Hj Wan Asrida, M.Si

Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl H.R. Soebrantas Km 12,5 simp Baru Pekanbaru

Tlp/Fax 0761-63227

Abstract

THIS research is motivated by the defunct local company's drinking water, so the need for water is a mandatory requirement for the community. Water infrastructure is one that is important to remember that water is a basic requirement is always consumed. The purpose of this study to influence the district government meranti islands and the inhibiting factors in the provision of clean water. The method used is a qualitatif research method with a descriptive type of reasearch that can be defined that can be interpreted as a problems-solving process to describe the state of the subject and object of reseacrh at the presesnt time based on the facts that appear.

Basa on the research that government efforts are still not up to the water supply in the districh high clifss theree are several factors that influence the government, namely the geographical conditions and economic factors

Keywords : disctrict government, in provition of clean water.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan air merupakan suatu kebutuhan wajib bagi masyarakat, prasarana air bersih merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang di konsumsi oleh masyarakat dan juga berpengaruh pada kelancaran aktivitas masyarakat tersebut.

Kebutuhan ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kualitas hidupnya yang mengalami peningkatan serta kegiatan perkotaan yang juga berkembang dengan pesat.

Kabupaten Kepulauan Meranti Khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas daerah 849,50 Km² berkapasitas 73.386

jiwa, guna memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian besar masyarakat Tebing Tinggi menggunakan air tanah dengan cara menggali sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan, tetapi kebutuhan air tidak layak minum.

Saat ini air bersih yang digunakan oleh masyarakat Tebing Tinggi memiliki kadar garam tinggi, berbau, dan berwarna kemerahan, hal ini dikarenakan air tanah gambut. Oleh karena itu masyarakat Tebing Tinggi menggunakan air hujan untuk kebutuhan air bersih. Keluarnya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Unit Pelaksana Teknis Air Bersih Pada Dinas Pekerjaan Umum belum berjalan.

Pesatnya pembangunan mempunyai arah dan tujuan secara umum yang memerlukan pemikiran-pemikiran secara menyeluruh tidak cukup hanya terbatas pada hasil pembangunannya sendiri. Salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat adalah dengan penyediaan air bersih.

Penyediaan air bersih dengan mutu yang baik dan biaya operasional yang murah sangat diperlukan oleh masyarakat Tebing Tinggi. Ketersediaan air bersih yang memadai memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, jasa, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyak masyarakat menikmati air bersih.

Pemerintah mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berupaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menanggapi hal ini Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertambangan dan Energi juga bekerja sama melalui swasta.

Dengan adanya keuntungan-keuntungan atau dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat serta perbaikan kualitas lingkungan terutama konverasi air tanah.

Setelah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi Kabupaten Baru, pengelolaan air bersih ini masih menjadi permasalahan. Hal ini di karenakan aset- aset pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibangun sebelumnya oleh Kabupaten Bengkalis belum dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini tidak dapat digunakan setelah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten baru di Provinsi Riau. Dalam hal ini timbulnya kerusakan pada aset penyediaan air bersih tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerjasama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang di sepakati bersama dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat moderen yang ditandai dengan meningkatnya

kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah moderen dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.¹ Rasyid berpendapat bahwa fungsi- fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Pengaturan (*regulation*)

Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Pembangunan (*developmen*)

3. Pelayanan (*Public Service*)

Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat

4. Pemberdayaan (*empowering*)

Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karna itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan

pemerintah,serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut secara mandiri mencakupi kebutuhannya.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdepatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan,

Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meskipun tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah

Kebijakan itu dirumuskan atau di definisikan secara subyektif

¹ Muhammad labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011, hal36

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah wawancara yaitu menggunakan daftar pertanyaan untuk narasumber observasi yaitu mengamati permasalahan langsung ke lapangan, dokumentasi yaitu peneliti menggunakan informasi atau dokumen yang sudah tersedia.

Setelah data dan bahan terkumpul, kemudian peneliti mengolah data tersebut berdasarkan gambaran secara rinci kenyataan yang ditemukan di lapangan dan wawancara. Kemudian setelah data terkumpul penulis mengelompokkan data sesuai dengan jenis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penyediaan Air bersih tahun 2012-2014. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudah memberikan Wewenang kepada Dinas- Dinas terkait dalam mengatasi penyediaan air bersih.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012

Pembuatan Sumur-Sumur Air Tanah

Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2012 melaksanakan pembangunan sumur galian atau sumur bor di setiap kecamatan dengan lokasi yang berbed. Adanya pembangunan sumur

bor ini diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi dan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan air bersih pada saat musim kemarau.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung masyarakat untuk memperoleh air bersih menjadi salah satu prioritas kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum. Dimana sarana dan prasarana yang dimaksud adalah pembuatan tempat pengampungan air yang terbuat dari beton dengan kapasitas 1.000 liter yang ditempatkan dekat dengan titik sumur bor yang dibangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Sebagaimana diketahui, Kecamatan Tebing Tinggi merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak terlepas dari persoalan kebutuhan air bersih. Setiap musim kemarau air bersih menjadi barang mahal bagi masyarakat, dikarenakan sumber air bersih sangat sedikit dan terbatas. Dengan demikian, pemerintah melaksanakan beberapa upaya dalam membantu masyarakat seperti halnya pada tahun 2012 yakni membuat sumur bor atau sumur galian dan membangun tempat penampungan air dari beton.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013.

Pembuatan Sumur-Sumur Air Tanah

Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2013 kembali melaksanakan pembangunan sumur galian atau sumur bor disetiap Kecamatan dengan lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Adanya pembangunan sumur bor ini diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi

dan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan air bersih pada saat musim kemarau. Pada tahun 2013 telah dibangun sebanyak 47 titik sumur yang terdiri dari sumur air payau 32 titik dan sumur air tawar 15 titik.

Penyediaan Sarana dan Prasarana tahun 2013

Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung masyarakat untuk memperoleh air bersih menjadi salah satu prioritas kerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum. Dimana sarana dan prasarana yang dimaksud adalah pembuatan tempat pengampungan air yang terbuat dari beton dengan kapasitas 1.000 liter yang ditempatkan dekat dengan titik sumur bor yang dibangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2013

Berdasarkan letak geografi dan ekosistem yang ada, wilayah kabupaten Kepulauan Meranti umumnya merupakan kawasan yang sering mengalami krisis air bersih walaupun memiliki curah hujan cukup tinggi. Bagi masyarakat terutama di Kecamatan Tebing Tinggi, pemenuhan kebutuhan air dengan mengandalkan sumber air tanah sangat besar. Sumber air di Tebing Tinggi sampai saat ini berasal dari: air sumur, telaga/kolam, dan air hujan yang ditampung melalui atap rumah kedalam bak-bak penampungan.

Menurut Bapak Fakhrudin pada tanggal 24 Februari tahun 2016 sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Air Bersih Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa :

Secara kuantitas sumber air tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat secara merata, sehingga selama ini bila musim kemarau masyarakat harus mendapatkan air bersih dengan cara membeli air perjerigen yang dijual keliling ataupun dijemput ditempat tersedianya air. Secara ekonomis banyak masyarakat yang keberatan jika harus membeli dari penjual air karena harganya yang mahal terutama kalangan ekonomi lemah.

Bagi masyarakat yang mampu dari segi ekonomi mereka membuat bak penampungan air hujan yang besar untuk menampung air hujan sehingga tidak mengeluarkan dana yang lebih besar lagi untuk membeli air tiap tahunnya.

Penyediaan Fasilitas Penampungan Air Hujan (PAH)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya menyediaakn air bersih kepada masyarakat dengan mengadakan penampungan air bersih yang diberikan kepada masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Penyediaan penampungan air hujan (PAH) dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013 dengan mengadakan Penampungan Air Hujan berkapasitas 500 liter sejumlah 420 buah dan 1.000 liter sejumlah 1212 buah yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kepulauan Meranti sebanyak 1.632 buah dengan anggaran yang dikeluarkan Rp.1.627.200.000,00.

Detail Engineering Design (DED) Air Bersih

Detail Engineering Design (DED) Dalam Pekerjaan Konstruksi

dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan DED Air Bersih yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Dimana pada tahun 2013 DED Air Bersih dilaksanakan dalam merancang penyediaan air bersih melalui UPT Sumber Daya Air untuk seluruh Kecamatan termasuk Kecamatan Tebing Tinggi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014

Pembuatan Sumur-Sumur Air Tanah

Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2014 kembali melaksanakan pembangunan sumur galian atau sumur bor di setiap kecamatan dengan lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Adanya pembangunan sumur bor ini diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi dan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan air bersih pada saat musim kemarau. Pada tahun 2014 telah dibangun sebanyak 70 titik.

Penyediaan Fasilitas Penampungan Air Hujan (PAH)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya menyediakan air bersih kepada masyarakat dengan mengadakan penampungan air bersih yang diberikan kepada masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Penyediaan penampungan air hujan (PAH) di lakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 dengan mengadakan Penampungan Air Hujan berkapasitas 500 liter sejumlah 460 buah dengan harga perunit Rp. 700.000,00 dan 1.000 liter sejumlah 1484 buah dengan harga perunit Rp. 1.100.000,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kepulauan Meranti sebanyak 1.944 buah dengan anggaran yang dikeluarkan Rp.1.954.200.400,00.

Khusus untuk Kecamatan Tebing Tinggi Penampungan Air Hujan (PAH) dibagikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

Perencanaan Optimalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Selatpanjang

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh pada tahun 2014 adalah melakukan perencanaan kembali untuk mengoptimalkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Selatpanjang yang telah ada. Perencanaan pengoptimalisasi tersebut dilakukan setelah adanya serah terima aset dari pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perencanaan Pembangunan Bendungan

Pembangunan bendungan merupakan bangunan multi fungsi seperti penyediaan air baku untuk kebutuhan air bersih. Apabila Kabupaten Kepulauan Meranti dilanda musim kemarau, khususnya di pulau Tebing Tinggi yang sangat parah mengalami kekeringan yang disebabkan kurangnya curah hujan

dibawah normal dalam satu musim dan surutnya beberapa sumber air baku yang memadai memicu keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Perencanaan pembangunan bendungan Di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Di Kecamatan Tebing Tinggi bukan hanya sekedar wacana. Pembangunan bendungan disungai Perumbi.

Koordinasi Penyulingan Air Laut Menjadi Air Bersih.

Pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menggandeng investor untuk melakukan desalinasi air laut menjadi air bersih yaitu PT Meranti Tirta Investasi di Dorak Selat Panjang, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Meranti, jelas sulit untuk bergantung pada kekuatan dana APBD, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berupaya untuk melibatkan pihak swasta lainnya yang berkeinginan berinvestasi membangun penyulingan air bersih. Dan peluang ini terbuka bagi swasta manapun juga, sepanjang kualitas air yang aman dikonsumsi dan terjamin kesehatannya.

Hasil Ujicoba Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

Masalah air bersih di Kabupaten Kepulauan Meranti hingga kini tak kunjung tuntas. Untuk itu pada tahun 2016 mendatang Pemkab akan lakukan ujicoba alat yang telah berhasil diterapkan di Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Alat tersebut bernama *The EcoloBlue Atmospheric Water*

Generator (AWG) yakni alat yang bisa menghasilkan air embun. *Atmospheric Water Generator* (AWG) bisa menghasilkan air bersih hingga 30 sampai 100 liter setiap hari dengan kondisi udara sekitar lingkungan tersebut lembab. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkonsultasi ke Dirjen Sumber Daya Air Di Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mengatasi permasalahan air yang dihadapi masyarakat Meranti.

Untuk itu tahun 2016 alat tersebut sudah bisa diterapkan dan bisa dilanjutkan pengembangannya. Alat ini merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan air mengingat daerah Kepulauan Meranti sangat cocok untuk diterapkan alat tersebut.

A. Faktor-Faktor penghambat dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2012-2014.

1. Faktor lingkungan

Permasalahan tata ruang dan pertanahan kedepan adalah masih diperlukannya berbagai kegiatan tata ruang, sehingga daya guna dukung ruang akan semakin baik dan optimal,

Faktor lingkungan meliputi terbatasnya sumber daya air dan kondisi tanah. Terbatasnya sumber daya air, dikarenakan di Kecamatan Tebing Tinggi dikelilingi selat dan sungai air asin sehingga sumber daya air tanah sudah terkontaminasi dengan air asin yang mengakibatkan kualitas sumber daya air kurang baik”

Kondisi tanah di Kecamatan Tebing Tinggi rawa dan gambut yang menjadi faktor penghambat dalam tersedianya sumber daya air bersih yang baik. Air tanah di Tebing Tinggi tidak layak minum, karena

kemerahan dan asam, yang disebabkan struktur tanah berupa *grey* humus dan hutan bakau. Jenis tanah ini, tergolong tanah dengan solum cukup dalam dan bergambut (lebih dari 100 cm), sehingga reaksi tanah tergolong sangat masam (pH 3,1–4,0), ini sangat terasa ketika penduduk membuat sumur, air sumurnya kemerahan dan asam.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor dominan yang sangat mempengaruhi terlaksananya program penyediaan air bersih karena berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk tercapainya program yang telah ditetapkan. Terbukti Sumber dana yang berasal dari APBD masih terbatas untuk pembangunan bendungan, penampungan air dan sebagainya.

3. Populasi yang semakin meningkat.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Di Kecamatan Tebing Tinggi sehingga kebutuhan air bersih semakin banyak sedangkan pasokan dan pengelolaan air bersih belum optimal.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah aset pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum dikembalikan oleh pemerintah sebelumnya yaitu pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bengkali sudah membangun Perusahaan Daerah Air Minum di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Samak, Dan Kecamatan Merbau. Pada tahun 2014 aset Perusahaan Air Minum (PDAM) yang berada di Kecamatan Tanjung Samak Baru akan dioptimalisasikan kembali pada tahun 2014. Sebaliknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di Tebing

Tinggi belum dapat dioptimalisasikan.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi masih sebatas penyediaan dan pelaksanaan pembangunan fisik. 1) Penyediaan air bersih yang dilakukan berupa penampungan air bersih/hujan (PAH), pembuatan sumur bor, pengoptimalisasi PDAM Selatpanjang, koordinasi antar dinas, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan air bersih, dan menggunakan hasil temuan peneliti mesin pengolah air. 2) Untuk mendukung penyediaan air bersih sebagaimana yang teruang dalam visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti pemerintah telah menerbitkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah mengenai sumber daya air. 3) Pemerintah melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam pembuatan sumur bor dan penampungan air hujan yang dilakukan sejak tahun 2011 sampai saat ini. 4) keterwakilan pemerintah melalui Dinas terkait menjadi bukti kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, dimana keterwakilan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program-program pembangunan yang dilaksanakan Dinas dalam penyediaan air bersih. 5) Koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan legislatif serta menjalin kerjasama dengan perusahaan penyediaan air minum telah berjalan dengan baik, akan tetapi belum mampu mengatasi masalah dalam penyediaan air bersih bila musim kemarau datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Labolo Muhammad. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nogi S Tangkilisan, Hesell. 2008. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mulyadi, Deddy 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY(Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patilima, Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta.
- Syahza, Almasdi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Riau : Cv Witra Irzani.
- Wahab, Abdul Sholichin. 2008. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Malang : UMM Pres.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti